

**PERAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP
PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI SWASTA DALAM
PENGGERJAAN PROYEK PEMERINTAH**

SKRIPSI



OLEH :

NINIK AGUSTINI
NPM : 23300122

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PERAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP
PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI SWASTA DALAM
PENGGERJAAN PROYEK PEMERINTAH**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA.



OLEH :

NINIK AGUSTINI
NPM : 23300122

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DAN
PERUSAHAAN OUTSOURCING ATAS
KESEWENANGAN PENGGUNA JASA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

FERLIX PRASETYA
NPM : 20300134

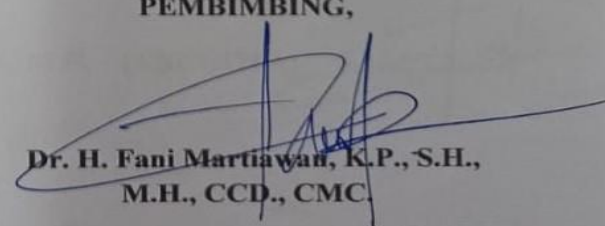
SURABAYA, 24 JULI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,


Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,


**Dr. H. Fani Martiawan, K.P., S.H.,
M.H., CCD., CMC**

**PERAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP
PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI SWASTA DALAM
PENGKERJAAN PROYEK PEMERINTAH**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

NINIK AGUSTINI
NPM : 23300122

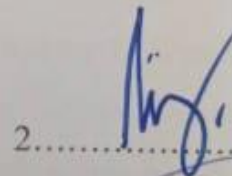
TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

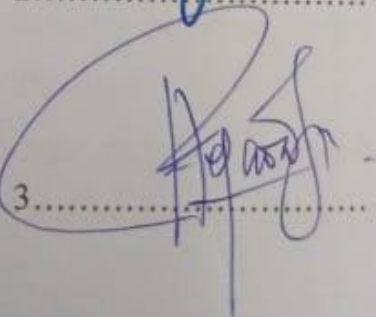
1. Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H.



2. Dr. R BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H.



3. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.KN.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

ng bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ninik Agustini
NPM : 23300122
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul : Peran Pemerintah Pusat Terhadap Perusahaan
Jasa Konstruksi Swasta Dalam Pengerjaan
Proyek Pemerintah

nyatakan bahwa Judul dan masalah hukum (isu hukum) yang dirumuskan
kah skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian atau
ya sendiri dan bukan merupakan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.
enyanggupi menerima sanksi secara akademik jika pernyataan tersebut
benar.

Surabaya, 03 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



NINIK AGUSTINI
NPM. 23300122

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Pusat Terhadap Perusahaan Jasa Konstruksi Swasta Dalam Pengerjaan Proyek Pemerintah. Penelitian ini mencoba untuk memotret praktik menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati dalam pengerjaan jasa konstruksi, utamanya adalah kontrak kerja jasa konstruksi antara pemerintah dengan pihak swasta. Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah, bagaimana bentuk pengelolaan Kerjasama Perusahaan Jasa Konstruksi Swasta pada penyelenggaraan proyek Pemerintah dan Kebijakan Hukum Pemerintah untuk melindungi Perusahaan Jasa Konstruksi Swasta yang ikut menyelenggarakan proyek Pemerintah.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Untuk mengkaji isu hukum di atas, digunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dikaji. Dalam hal pengumpulan bahan hukum digunakan teknis studi kepustakaan yang diambil dari sumber-sumber bahan hukum yang representatif, bahan hukum bersumber dari perundang-undangan yang berlaku.

Hasil temuan tersebut menjadi ulasan bahwa Pengelolaan Kerjasama Perusahaan Jasa Konstruksi swasta pada penyelenggaraan proyek Pemerintah harus memperhatikan banyak aspek utamanya adalah asas-asas dalam berkontrak, agar kontrak tersebut menjadi proporsional dan berimbang sehingga saling menguntungkan baik pihak penyedia jasa maupun pihak pengguna jasa konstruksi. Dalam hal terjadi permasalahan dalam praktiknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memberikan sarana perlindungan hukum ketika terjadi perselisihan antara penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi. Perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif, penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu melalui upaya perundingan agar mencapai mufakat dalam penyelesaian permasalahan yang timbul. Namun demikian tidak menutup kemungkinan sengketa yang muncul diselesaikan dengan menggunakan jalur peradilan (litigasi) sebagai ultimum remedium sebagai bentuk perlindungan represif.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Pusat, Perusahaan Jasa Konstruksi Swasta, Proyek Pemerintah.

ABSTRACT

This research is entitled The Role of the Central Government in Private Construction Services Companies in Working on Government Projects. This research tries to photograph the practice of deviating from agreed agreements in the work of construction services, mainly construction service work contracts between the government and the private sector. This research is to answer the problem formulation, what is the form of management of Private Construction Services

Company Cooperation in implementing Government projects and Government Legal Policy to protect Private Construction Services Companies that participate in implementing Government projects.

This thesis is normative legal research. To study the legal issues above, normative legal research methods are used, using a statutory approach and a conceptual approach to find answers to the legal issues being studied. In the case of collecting legal materials, technical literature studies are used which are taken from representative sources of legal materials, legal materials are sourced from applicable legislation.

The results of these findings serve as a review that the Management of Cooperation with Private Construction Services Companies in implementing Government projects must pay attention to many aspects, the main of which is the principles of contracting, so that the contract is proportional and balanced so that it is mutually beneficial for both the service provider and the construction service user. In the event that problems arise in practice, Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services provides a means of legal protection when a dispute occurs between construction service providers and construction service users. Preventive protection and repressive legal protection, dispute resolution can be resolved first through negotiation efforts to reach consensus in resolving problems that arise. However, this does not rule out the possibility that disputes that arise will be resolved using judicial channels (litigation) as the ultimum remedium as a form of repressive protection.

Keywords : *Central Government Policy, The Private Construction Service Business, Government Project*

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ASBTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Konseptual.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	19
BAB II BENTUK PENGELOLAAN KERJASAMA PERUSAHAAN JASA KONTRUKSI PADA PENYELENGGARAAN PROYEK PEMERINTAH.....	21
2.1 Tinjauan Umum Jasa Konstruksi.....	21
2.2 Karakteristik Perjanjian Jasa Konstruksi.....	23
2.3 Bentuk Konsep Yang Baik Dalam Mengelola Proyek Pemerintah Dengan Melalui Jasa Konstruksi Swasta.....	36
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN JASA KONTRUKSI SWASTA DALAM PENYELENGGARAAN PROYEK PEMERINTAH.....	43
3.1 Kedudukan Hukum Perusahaan Jasa Konstruksi Swasta.....	43
3.2 Badan Usaha Milik Swasta.....	45
3.3 Bentuk Kebijakan Hukum Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Perusahaan Jasa Konstruksi Swasta Dalam Penyelenggaraan Proyek Pemerintah.....	54
BAB IV PENUTUPAN.....	66
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran.....	67
DAFTAR BACAAN.....	68